

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.69 JAKARTA 12190
TELEPON (021)7398381-7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS <https://www.menpan.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM NONPERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Reublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 278);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM NONPERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Instrumen Hukum NonPeraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini sebagai Program

Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026.

- KEDUA : Program Pembentukan Instrumen Hukum NonPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa menginformasikan perkembangan penyusunan berdasarkan Program Pembentukan Instrumen Hukum NonPeraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap triwulan kepada Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.
- KEEMPAT : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum melakukan verifikasi atas perkembangan realisasi Program Pembentukan Instrumen Hukum Non Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk selanjutnya dilaporkan Kepada Menteri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,



Tembusan:

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;
2. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
5. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan;
6. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
8. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi;
9. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
10. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
11. Inspektur Kementerian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 225 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
INSTRUMEN HUKUM NONPERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN INSTRUMEN HUKUM NONPERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Kedeputan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan						
Peraturan Presiden						
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (2025-2040)	1. Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 terkait transformasi tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi	1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih	Seluruh Instansi K/L/D	Lungsuran Tahun 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap Pembahasan PAK; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		2. Perencanaan induk yang berisi arah kebijakan reformasi birokrasi jangka panjang (periode 2025-2045)	dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.			
Keputusan Menteri						
1	Rancangan Keputusan Menteri PANRB tentang Instansi Pemerintah Pelaksana	1. Percepatan pembangunan Zona Integritas	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas	Instansi Pelaksana Evaluasi WBK Mandiri	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2026	pada instansi pemerintah. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Tim Penilai Internal pada instansi pemerintah	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah			Kementerian PANRB; 2. Sedang dilakukan analisa terhadap pelaksanaan evaluasi ZI Menuju WBK secara Mandiri; dan 3. Terkonfirmasi.
2	Rancangan Keputusan Menteri PANRB tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026	Sebagai dasar penetapan bagi unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2026	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan	Seluruh K/L/D	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; 2. Akan diterbitkan setelah evaluasi ZI tahun 2026 selesai; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Melayani di Instansi Pemerintah			
Surat Edaran						
1	Rancangan Surat Edaran Menteri PANRB tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2026	Sebagai dasar pelaksanaan pengusulan dan evaluasi ZI Tahun 2026	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Seluruh K/L/D	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.
2	Rancangan Keputusan Menteri PANRB tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PANRB Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju	1. Sebagai dasar pencabutan predikat ZI Menuju WBK/WBBM 2. Sebagai dasar bagi unit kerja tentang status predikat ZI	Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Seluruh K/L/D	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah disusun dan ditanda tangani Kepmen oleh Menteri PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021	Menuju WBK/WBBM yang disandangnya.	Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah			
Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana						
Peraturan Presiden						
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Sultan Amai Gorontalo	1. Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan dan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan. 2. Untuk meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Sekretariat Agama 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilaksanakan Harmonisasi; 2. Menunggu Saimon; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		3. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas				
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Institut Agama Islam Negeri Kendari menjadi Universitas Islam Kendari	1. Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan dan daya jangkauan pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan. 2. Untuk meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan. 3. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Sekretariat Agama 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilaksanakan Harmonisasi; 2. Menunggu Saimon; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang menjadi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang	1. Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan dan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan. 2. Untuk meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan. 3. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Sekretariat Agama 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilaksanakan Harmonisasi; 2. Menunggu Saimon; dan 3. Terkonfirmasi.
Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur						
Peraturan Pemerintah						
1	Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur	1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Keuangan	Usulan baru Tahun 2026	1. Telah terbit PP No. 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2026	pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, diantaranya penetapan gaji dan tunjangan; 2. Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; dan untuk meningkatkan pembelanjaan	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	3. Kementerian Sekretariat Negara 4. Kementerian Hukum RI		Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2026; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.				
Keputusan Menteri						
1	Rancangan Keputusan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota	Kebutuhan akan Standar Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota semakin menguat seiring dengan meningkatnya tuntutan adaptasi terhadap	1. PP Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen PNS 2. PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Menunggu penetapan bu menteri; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		transformasi digital, penerapan tata kelola berbasis kinerja, serta penguatan kapasitas kepemimpinan publik. Kejelasan standar kompetensi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki acuan yang seragam, terukur, dan relevan dalam perencanaan kebutuhan, mobilitas talenta, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja jabatan manajerial. Selaras dengan kebutuhan tersebut.				
2	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi	Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional dibutuhkan guna memastikan kesesuaian antara	PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Proses penetapan; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
3	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan	tuntutan jabatan dan kompetensi pejabat fungsional sehingga pelaksanaan tugas berlangsung profesional, terukur, dan akuntabel. Standar kompetensi juga menjadi acuan dalam penerapan manajemen ASN berbasis merit	PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF		Konfirmasi Klarifikasi 1. Pembahasan dan legal drafting dengan instansi Pembina; dan 2. Terkonfirmasi.
4	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal		PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF		Konfirmasi Klarifikasi 1. Belum pembahasan dengan instansi Pembina; dan 2. Terkonfirmasi.
5	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan		PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF		Konfirmasi Klarifikasi 1. Belum pembahasan dengan instansi Pembina; dan 2. Terkonfirmasi.
6	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang ESDM		PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF		Konfirmasi Klarifikasi 1. Belum pembahasan dengan instansi Pembina; dan 2. Terkonfirmasi.
7	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi		PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan		Konfirmasi Klarifikasi 1. Belum pembahasan dengan instansi Pembina; dan

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan			seluruh instansi pengguna JF		2. Terkonfirmasi.
8	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penghulu		PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF		Konfirmasi Klarifikasi 1. Belum pembahasan dengan instansi Pembina; dan 2. Terkonfirmasi.
9	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama		PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF		Konfirmasi Klarifikasi 1. Belum pembahasan dengan instansi Pembina; dan 2. Terkonfirmasi.
10	Rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa		PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Instansi Pembina JF terkait dan seluruh instansi pengguna JF		Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah dilakukan penetapan; dan 2. Terkonfirmasi.
11	Rancangan Keputusan Menteri terkait Faktor Koreksi dalam Pengukuran Penerapan Indeks Sistem Merit		PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Seluruh Instansi Pemerintah	Usulan baru Tahun 2026	Sedang dalam tahap pembahasan bersana BKN dan LAN. Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan; dan 2. Terkonfirmasi.
Kedeputan Bidang Pelayanan Publik						
Peraturan Presiden						

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik (dengan mengakomodir: Perpres MPP, Indeks Pelayanan Publik, Inovasi, termasuk terkait dengan mekanisme pembayaran ganti rugi dalam pelayanan publik	1. Penyempurnaan kebijakan, sinergi dan kolaborasi Pelayanan Publik nasional termasuk Transformasi Digital 2. IPP masuk kedalam RPJPN	Seluruh kebijakan Pelayanan Publik Nasional	Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.
Keputusan Menteri						
1	Rancangan Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Instansi Level Meso (Simpul Koordinasi) Dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!)	Penetapan ini juga diperlukan guna memastikan pengelolaan pengaduan lintas instansi dapat terkoordinasi secara efektif melalui instansi yang berperan sebagai simpul koordinasi pada masing-masing	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	1. Kementerian Koordinator 2. Kantor Staf Presiden, 3. Kemendagri, 4. Komdigi, 5. Ombudsman Republik Indonesia 6. Kementerian PANRB,	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		sektor pelayanan publik.	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024	7. Pemerintah Provinsi.		
Pedoman Menteri						
1	Rancangan Pedoman Menteri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!)	Dalam rangka melindungi aplikasi LAPOR! dari berbagai bentuk ancaman baik internal maupun eksternal yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.	1.UU 25/2009 tentang pelayanan public 2.PP 96/2012 tentang pelaksanaan UU 25/2009 3.Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	BSSN	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional			
2	Rancangan Pedoman Menteri tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD	Pedoman ini akan menjadi panduan teknis Kementerian PANRB dan/atau Penyelenggara (Instansi Pemerintah) dalam menyelenggarakan KIPP Nasional, Instansional dan/atau Regional, sekaligus mencabut Pedoman Menteri PANRB tentang KIPP sebelumnya.	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25/2009 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik	1. Kementerian/ Lembaga, 2. Pemerintah Daerah, 3. BUMN, dan 4. BUMD.	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
3	Rancangan Pedoman Menteri tentang Pemetaan dan Pendampingan Hub jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP)	Sebagai panduan bagi Kementerian PANRB dalam melaksanakan pemetaan dan pendampingan hub JIPP	Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik	Instansi Pemerintah	Lungsuran Tahun 2024	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.
Kedeputian Bidang Transformasi Digital Pemerintah						
Peraturan Presiden						
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital	Saat ini, transformasi digital telah menjadi agenda strategis utama dalam pembangunan nasional Indonesia, memainkan peran krusial dalam memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong	1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital	1. Kementerian Komunikasi dan Digital; 2. Kementerian Keuangan; 3. Badan Siber dan Sandi Negara	Lungsuran Tahun 2025	Konfirmasi TW I 2026 1. Sudah mengajukan izin Prakarsa; 2. Akan dilakukan forum diskusi publik bulan april ini; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		pertumbuhan yang inklusif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPJN) Tahun 2025-2045, yang menetapkan transformasi digital sebagai salah satu dari 17 tujuan strategis pembangunan nasional (RPJPN, 2024).	dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional			
Keputusan Menteri						
1	Rancangan Keputusan Menteri PANRB tentang Perluasan Piloting Program Perlindungan Sosial	-	-	-	-	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah dilakukan pembahasan dengan dewan ekonomi nasional; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
2	Rancangan Keputusan Menteri tentang Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital	Merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Seluruh Instansi K/L/D	-	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah di legal drafting bersama Biro SDMOH 2. Terkonfirmasi.
3	Rancangan Keputusan Menteri tentang Layanan Digital Manajemen ASN	-	-	-	-	Konfirmasi TW I 2026 1. Menunggu penetapan; dan 2. Terkonfirmasi
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama						
Pedoman						
1	Rancangan Pedoman Menteri tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2025-2029	Pedoman teknis internal atas peta jalan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2025-2029	1. Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (2025-2040) 2. Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Menunggu Penetapan Perpres GDRBN dan PermenPANRB RMRBN; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum						
Keputusan Menteri						
1	Keputusan Menteri PANRB tentang Pakaian Dinas di Kementerian PANRB	dalam rangka meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta citra aparatur sipil negara di Kementerian PANRB	Keputusan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2022	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	1. Sudah ditetapkan Nomor 114 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pakaian Dinas Pegawai PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.
2	Keputusan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan di Kementerian PANRB	Dalam rangka penyesuaian organisasi dan tata kerja Kementerian PANRB (PermenPANRB no.1 Tahun 2025)	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
3	Rancangan Keputusan Menteri tentang Struktur Corporate University di Kementerian PANRB	Untuk menjamin penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi melalui Corporate University di lingkungan Kementerian PANRB	1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan	LAN	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) pada Tingkat Instansi			
4	Keputusan Menteri tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian PANRB Tahun 2026	Untuk memastikan proses pemetaan kinerja dan potensi, penetapan Kotak Manajemen Talenta, serta pengelolaan rencana suksesi dan pengembangan talenta berjalan secara objektif, terintegrasi, dan akuntabel	1. Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN 2. Peraturan Menteri PANRB No. 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah ditetapkan melalui Kepmen PANRB No. 53 Tahun 2026 tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian PANRB Tahun 2026; dan 2. Terkonfirmasi.
5	Keputusan Menteri tentang Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara	Untuk membantu Komite Talenta dalam melaksanakan tugasnya	1. Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah ditetapkan melalui Kepmen

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Kementerian PANRB Tahun 2026		Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN 2. Peraturan Menteri PANRB No. 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN			PANRB No. 113 Tahun 2026; dan 2. Terkonfirmasi.
6	Rancangan Keputusan Menteri tentang Pemberian Wewenang Berupa Mandat Kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Pembinaan Kepegawaian	Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sedang dalam proses pengajuan tandatangan Menteri; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,			

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi			
Pedoman Menteri						
1	Rancangan Pedoman Menteri tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Adanya perkembangan kebijakan, regulasi, dan kebutuhan organisasi yang terjadi di lingkungan Kementerian PANRB, khususnya dalam pengelolaan arsip kepegawaian. Saat ini, PermenPANRB No. 42 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Kementerian PANRB sudah kurang relevan, sehingga dibutuhkan pembentukan pedoman guna	1. UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 4. PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian PANRB 5. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara lain: Perka ANRI Nomor 47	ANRI	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		penyesuaian pengelolaan arsip kepegawaian yang tercipta dari setiap kegiatan dalam organisasi.	Tahun 2015 tetang JRA, Perka ANRI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip 6. Keputusan Menteri PANRB Nomor 360 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis di Kementerian PANRB			
2	Rancangan Pedoman Menteri tentang Mutasi/Rotasi di lingkungan Kementerian PANRB	Penyusunan pedoman atau aturan internal mengenai rotasi/mutasi pegawai di lingkungan suatu kementerian menjadi penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur berjalan secara terarah, objektif, dan akuntabel. Aturan internal memberikan kriteria, mekanisme, dan prosedur yang jelas dalam	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja	Instansi yang mengusulkan rotasi/mutasi masuk ke Kemenpanrb	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		pelaksanaan rotasi/mutasi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB	Pegawai Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi.			
3	Rancangan Pedoman Menteri tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian PANRB	Penyusunan pedoman terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan melalui tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri di Kementerian PANRB	1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di	1. Badan Kepegawaian Negara, 2. Kemendikti saintek	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; 2. Akan merevisi pedoman yang berlaku saat ini yaitu pedoman nomor 8 Tahun 2023; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
4	Rancangan Pedoman Menteri tentang Corporate University di lingkungan Kementerian PANRB	Penyusunan pedoman terkait pelaksanaan Corporate University di lingkungan Kementerian PANRB untuk mengatur terkait tata kelola penggunaan sistem pembelajaran terintegrasi berbasis Corporate University	1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi	LAN RI	Usulan Baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal ; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			(Corporate University) pada Tingkat Instansi			
5	Rancangan Pedoman Menteri tentang Penetapan Predikat Kinerja Individu di lingkungan Kementerian PANRB	Pola distribusi predikat kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN baik periodik maupun tahunan ditetapkan berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik dan tahunan. Kemudian untuk memberikan kepastian mengenai cara penetapan predikat kinerja individu, baik periodik maupun tahunan di lingkungan Kementerian PANRB, maka perlu ditetapkan pedoman Menteri PANRB	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Individu				
Biro Data dan Teknologi Informasi						
Pedoman menteri						
1	Rancangan Pedoman Menteri PANRB tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian PANRB	Pedoman teknis internal mengenai penerapan manajemen keamanan informasi dalam rangka menjaga keamanan siber di lingkungan Kementerian PANRB	Perka BSSN tentang SMKI	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal, dan 2. Terkonfirmasi.
2	Rancangan Pedoman Menteri tentang Tata Kelola Pemerintah Digital di Lingkungan Kementerian PANRB	Pedoman teknis internal mengenai tata kelola data, sistem informasi, layanan, infrastruktur TIK, dan keamanan pemerintah digital di lingkungan Kementerian PANRB	Perpres Pemerintah Digital	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal, dan 2. Terkonfirmasi.
Keputusan Menteri						

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
1	Rancangan Keputusan Menteri tentang Tim CSIRT	Tim yang menangani insiden keamanan siber di Kementerian PANRB	Perka BSSN tentang SMKI	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.
2	Keputusan Menteri tentang Tim Penanggung Jawab Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Tim yang menangani penerapan manajemen keamanan informasi di Kementerian PANRB	Peraturan Kepala BSSN tentang SMKI	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.
3	Keputusan Menteri tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Statistik Sektoral	adanya ketentuan yang mengatur pembentukan Tim dari Perban BPS No. 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Statistis Sektoral	Peraturan Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Statistik	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.
4	Keputusan Menteri tentang Arsitektur Pemerintah Digital	dalam rangka evaluasi pemerintah digital	Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.
5	Keputusan Menteri tentang rencana aksi pemerintah digital	dalam rangka evaluasi pemerintah digital	Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Biro Komunikasi dan Informasi Publik						
Pedoman Menteri						
1	Rancangan Pedoman Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian PANRB	Beradaptasi dengan sejumlah perubahan yang ada pada organisasi dan teknologi di Kementerian PANRB, maka perlu diakomodir sejumlah penyesuaian antara lain perubahan Logo Kementerian PANRB yang berpengaruh terhadap legalisasi naskah dinas dan korespondensi kedinasan, sistem dan aplikasi yang digunakan, penggunaan tanda tangan elektronik, kewenangan pengesahan Naskah Dinas dan penomoran, hingga	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	ANRI	Lungsuran Tahun 2023, 2024 dan 2025.	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		perubahan organisasi dan tata kerja.	dan Reformasi Birokrasi; 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian PANRB.			
Biro Umum dan Keuangan						
Pedoman Menteri						
1.	Rancangan Pedoman Menteri tentang Keprotokolan di Kementerian PANRB	Sebagai dasar dan upaya optimalisasi layanan keprotokolan, serta untuk kelancaran pelaksanaan acara di lingkungan Kementerian PANRB. Saat ini sudah ada Peraturan Menteri PANRB No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan	1. UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan 2. Permenpan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB	Lungsuran Tahun 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; 2. Naskah urgensi sedang disusun; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai landasan pelaksanaan layanan keprotokolan, namun ada beberapa point yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini (nomenklatur dan SOTK)				
2	Rancangan Pedoman Menteri PANRB tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian PANRB	Menindaklanjuti arahan BPK untuk menyusun pedoman teknis pemberian uang harian dalam perjalanan dinas luar negeri. Pedoman ini akan mengatur mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan contoh kasus pemberian uang harian. Sebagai tindak lanjut BPK	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara	Kementerian Keuangan	Lungsuran tahun 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri			
3	Pedoman Menteri PANRB tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2026	Petunjuk teknis pelaksanaan belanja di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2026	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);	Kementerian Keuangan	Usulan Baru	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah ditetapkan Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2026; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri			
4	Rancangan Pedoman Menteri tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian PANRB	Panduan Pelaksanaan APBN di Kementerian PANRB yang perlu dilakukan updating agar sesuai kondisi riil dan peraturan yang berlaku. Serta akan mencabut Pedoman 3 Tahun 2025 tentang 4 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Kementerian Pendayagunaan	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor	Kementerian Keuangan	Usulan Baru	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal, dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara			
5	Rancangan Pedoman Menteri tentang Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMN di Kementerian PANRB	Petunjuk teknis yang merupakan bagian dari pengelolaan BMN di Kementerian PANRB yang saat ini belum adanya landasan hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain	Kementerian Keuangan	Lungsuran Tahun 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
6	Pedoman Menteri tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di Kementerian PANRB	Petunjuk teknis pembayaran tunjangan kinerja yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri PANRB tentang Tunjangan Kinerja yang disusun oleh Layanan Kepegawaian, Biro SDMOH dimana hal ini diperlukan untuk pembayaran tunjangan kinerja dilakukan tepat waktu dan sesuai peraturan berlaku.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain	Kementerian Keuangan	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.
Inspektorat						
Pedoman Menteri						
1	Pedoman Tata Kelola Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan	Belum optimalnya unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal	1. Permenpan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan,	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan pedoman pemantauan tindak lanjut sebagai salah satu upaya untuk mendorong perbaikan tata kelola organisasi serta peningkatan komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi.	Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 2. Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.			
2	Pedoman Menteri tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	diperlukan kebijakan yang mengatur terkait pelaksanaan pelaporan LHKPN di internal KemenPANRB yang selaras dan relevan dengan peraturan nasional yang berlaku.	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			2. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara			

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

